

SKRIPSI

**PENGAWASAN PENGHIMPUNAN DANA MASYARAKAT TANPA IZIN
OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN PROVINSI SUMATERA BARAT**

*Diajukan Guna Melengkapi Sebagian Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*

Oleh:

DILLA FEBRIANI

1410111108

PROGRAM KEKHUSUSAN: HUKUM PERDATA (PK I)

**DOSEN PEMBIMBING: Dr. H. Busyra Azheri, S.H., M.H.
Dr. H. Rembrandt, S.H., M.Pd.**



FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG

2019



No. Alumni Universitas:	Nama Mahasiswa: Dilla Febriani	No. Alumni Fakultas:
a) Tempat/Tanggal Lahir: Baiang Malalo/ 15 Februari 1996	f) Tanggal Lulus : 30 Agustus 2019	
b) Nama Orang Tua: Aidil Fitri dan Mardawati	g) Predikat Lulus :Sangat Memuaskan	
c) Fakultas : Hukum	h) IPK : 3,60	
d) Program Kekhususan : Hukum Perdata	i) Lama Studi : 5 Tahun	
e) No.Bp. : 1410111108	j) Alamat : Sawahan Timur, Padang.	

PENGAWASAN PENGHIMPUNAN DANA MASYARAKAT TANPA IZIN OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN PROVINSI SUMATERA BARAT

(Dilla Febriani, 1410111108, Program Kekhususan Hukum Perdata (PK I), Fakultas Hukum Universitas Andalas, 2019, 73 Halaman)

ABSTRAK

Bisnis di bidang keuangan merupakan salah satu bisnis yang rentan terhadap penyelewengan atau penyalahgunaan yang menyebabkan kerugian. Salah satu permasalahan di sektor jasa keuangan yang marak terjadi adalah adanya kegiatan penghimpunan dana masyarakat tanpa izin atau ilegal. Masalah yang dibahas dalam skripsi ini adalah: a) Bagaimanakah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan terhadap aktifitas penghimpunan dana masyarakat. b) bagaimana tindakan yang diambil Otoritas Jasa Keuangan apabila perusahaan yang melakukan aktifitas penghimpunan dana masyarakat tidak memiliki izin. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan menjawab permasalahan menggunakan literatur dan buku-buku serta harmonisasi dengan peraturan-peraturan terkait. Hasil penelitian dan pembahasan menjelaskan bahwa pengawasan Otoritas Jasa Keuangan terhadap aktivitas penghimpunan dana masyarakat dilakukan dengan mengatur dan mengawasi aktifitas Jasa Keuangan serta memberikan perlindungan konsumen bagi konsumen jasa keuangan. Otoritas Jasa Keuangan tidak dapat menghentikan secara langsung apabila perusahaan yang melakukan aktifitas penghimpunan dana masyarakat tidak memiliki izin, namun untuk memenuhi kewajibannya dalam melindungi konsumen jasa keuangan, Otoritas Jasa Keuangan membentuk Satgas Waspada Investasi untuk mencegah dan menangani terjadinya tindakan melawan hukum di bidang penghimpunan dana masyarakat dan pengelolaan investasi.

Kata kunci: *penghimpunan dana, ilegal, Otoritas Jasa Keuangan.*

Abstrak telah disetujui oleh penguji.

Penguji,

Tanda Tangan	1.	2.
Nama terang	Prof. Dr.Hj. Yulia Mirwati, S.H.,Cn.,MH	Drs.H.Ali Amran, S.H., M.H.

Mengetahui,

Ketua Bagian Hukum Perdata : **Dr. Dahliil Marjon, S.H., M.H.**

Tanda Tangan

Alumnus telah mendaftar ke Fakultas/Universitas dan mendapat nomor alumnus:

	Petugas Fakultas/Universitas	
No. Alumni Fakultas	Nama:	Tanda Tangan:
No. Alumni Universitas	Nama:	Tanda Tangan: